



Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana Oleh BPBD Kabupaten Pasaman

Taufani Ahmad, Roni Ekha Putera, Hendri Koeswara

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Andalas, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: January 13, 2024
Revised: February 19, 2024
Available online: March 30, 2024

KEYWORDS

Program Implementation, Disaster Management, Disaster Risk Reduction

CORRESPONDENCE

Name: Roni Ekha Putera
E-mail: roniekhaputera@soc.unand.ac.id

A B S T R A C T

The study aim of this research is to find out how the Disaster Risk Reduction Program is implemented by BPBD Pasaman Regency. This research uses a qualitative descriptive research type using Policy Implementation Theory by Van Meter Van Horn. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, conclusions, and verification. The research results found that the implementation of the disaster risk reduction program by BPBD Pasaman Regency had not been implemented optimally. This can be seen from the fact that there are still problems in the process of implementing disaster risk reduction program activities, such as the lack of apparatus resources owned by the Pasaman Regency BPBD in realizing or implementing the disaster risk reduction program carried out by the Pasaman Regency BPBD. Apart from that, the lack of budget in the process of implementing disaster risk reduction programs is also an obstacle in implementing this program, which causes programs and activities not to run as they should. In the implementation process, the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Pasaman Regency should provide training and the provision of knowledge regarding disaster management to the community, which cannot be implemented optimally.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan akan kejadian bencana alam, hal ini dipengaruhi oleh faktor letak dan keadaan Indonesia (Maharani, 2023). Secara geografis Indonesia terletak di antara dua Benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta berada di antara dua Samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia juga terletak pada jalur *ring of fire* atau disebut dengan jalur cincin api pasifik (Azizah et al., 2021). Sedangkan secara geologi Indonesia terletak di antara tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Hindia-Australia (Alif et al., 2021; Lubis, 2020).

Bencana yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor kondisi geografis, geologis, demografis, serta sosiologis Indonesia, hal ini juga menegaskan bahwa bencana merupakan ancaman serius yang dihadapi Indonesia (Suhardjo, 2015). Berdasarkan geoportal data bencana Indonesia sepanjang tahun 2022 terjadi sebanyak 3.522 kejadian. Data tersebut meliputi 28 kejadian gempa bumi, 1 erupsi gunung api, 1.520 banjir, 1.057 cuaca ekstrem, 634 tanah longsor 634.152 bencana kebakaran hutan dan lahan, 8.726 orang luka-luka, dan setidaknya 5.423.652 orang menderita (BNBP, 2023).

Sebagai negara yang rawan terhadap bencana, Indonesia sadar akan potensi kerugian yang ditimbulkan baik itu korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana, kerugian harta benda serta dampak psikologis yang dapat menghambat pembangunan nasional (Prasetya & Camara Paris, 2022). Hal ini dapat dilihat berdasarkan dimensi perundang-undangan dimana saat ini sejatinya pemerintah Indonesia telah mengintroduksi beberapa landasan hukum yang mengatur tentang kebencanaan, langkah ini merupakan suatu kemajuan yang signifikan, setidaknya penanganan bencana akan lebih standar dan terlembagakan. Meskipun proses penanggulangan serta penanganan bencana di Indonesia terlihat masih parsial

dan kurang responsif serta belum terlembaga dengan baik, serta kurangnya koordinasi sejak proses pencegahan serta evakuasi area pengungsian yang kurang representatif dan penyaluran bantuan yang tak tepat sasaran, disisi lainnya volume kejadian bencana terus meningkat (Desfandi, 2014; Tahmidaten & Krismanto, 2019; Tamitiadini et al., 2019).

Sumatera Barat merupakan daerah yang sangat rentan terhadap berbagai potensi bencana. Dibalik keindahan, kekayaan alam dan nilai historis yang dimiliki oleh daerah ini, Provinsi Sumatera Barat yang terletak di sepanjang pesisir pantai Sumatera dengan luas wilayah 4.229.730 Ha ini memiliki potensi bencana dengan ancaman bencana gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan (Arif, 2019).

Hal ini mungkin terjadi karena pergerakan lempeng bumi yang membujur di sepanjang pesisir bagian barat Pulau Sumatera sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, ditambah lagi dengan keberadaan empat segmen aktif patahan bumi, yaitu segmen Sianok, segmen Suliki, segmen Sumani dan segmen Sumpur yang berpotensi menimbulkan gempa di kawasan Bukit Barisan yang melintasi Sumatera Barat. Salah satu Kabupaten yang memiliki potensi bencana tinggi di Sumatera Barat adalah Kabupaten Pasaman, dimana Kabupaten Pasaman memiliki kejadian bencana alam yang cukup banyak dan beragam. Fenomena bencana yang terjadi di Kabupaten Pasaman merupakan bencana alam dan non alam. Secara umum fenomena bencana ini diakibatkan karena keberadaan Kabupaten Pasaman yang terletak pada jajaran patahan Semangka (Sesar Sumatera) dan terletak di antara dua Segmen aktif, yakni Segmen Sumpur dan Segmen Talamau ditambah lagi dengan rata-rata curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan banyaknya peristiwa bencana terutama pada musim penghujan di Kabupaten Pasaman. Berikut adalah data

bencana yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2018-2022 di Kabupaten Pasaman adalah sebagai

berikut pada tabel 1:

Tabel 1. Data Kebencanaan Kabupaten Pasaman 2018-2022

No.	Bencana	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah	Luas (Ha)	Potensi
1.	Banjir	9	8	15	11	9	52	110.703,40	Tinggi
2.	Tanah Longsor	5	4	6	9	7	31	98.156,87	Tinggi
3.	Karhutla	4	1	3	2	1	11	87.981,76	Sedang
4.	Angin Kencang	18	15	8	14	12	67	73.802,21	Tinggi
5.	Pohon Tumbang	27	23	39	32	29	150	64.786,33	Tinggi
6.	Banjir Bandang	15	9	10	8	6	48	66.901,46	Tinggi
7.	Kekeringan	4	2	3	8	7	24	56.138,78	Sedang
	Jumlah	82	62	84	84	71	383		

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu 2018-2022. Bencana yang paling sering terjadi adalah pohon tumbang dengan 150 kasus kejadian bencana, diikuti oleh bencana angin kencang dengan 67 kasus kejadian bencana dan bencana banjir dengan 52 kasus kejadian bencana. Dalam kurun waktu tersebut setidaknya terjadi bencana gempa bumi dan banjir bandang yang dikategorikan cukup besar di Kabupaten Pasaman, yaitu peristiwa banjir bandang yang melanda Kecamatan Mapat Tunggul Selatan tepatnya di Jorong I dan II Muaro, Nagari Muaro Sungai Lolo pada tanggal 15 Februari 2020. Dimana bencana banjir bandang ini menelan satu korban jiwa, kerusakan bangunan dan jembatan serta merusak pertanian masyarakat yang memberikan dampak kerugian bagi masyarakat.

Selanjutnya peristiwa bencana gempa bumi yang disusul bencana banjir bandang yang melanda Kecamatan Tigo Nagari tepatnya di Nagari Malampah pada tanggal 28 Maret tahun 2022. Dimana bencana ini mengakibatkan 56 orang meninggal dunia, 6 orang luka berat, 36 orang luka ringan, 5 orang hilang dan 6.785 orang mengungsi ketempat pengungsian. Selain itu bencana ini juga setidaknya merusak 384 bangunan yang terdiri dari fasilitas umum, tempat peribadatan dan rumah masyarakat, merusak perkebunan dan pertanian masyarakat, serta merusak jalan dan jembatan. Berikut ini adalah gambar fenomena kejadian bencana banjir bandang di Kabupaten Pasaman.



Gambar 1. Kejadian banjir bandang di Kabupaten Pasaman

Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Pasaman 2022

Berdasarkan gambar 1. dapat dilihat kejadian bencana banjir bandang pada salah satu daerah di Kabupaten Pasaman, yakni Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan dan Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Fenomena banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Pasaman memberikan dampak kerugian terhadap proses pelayanan publik, terutama pada sarana dan prasarana dan

korban jiwa, serta merusak perekonomian masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman serta BPBD Kabupaten Pasaman sebagai *leading sektor* penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman dituntut agar selalu siap dan siaga dalam menghadapi bencana yang akan terjadi dan melaksanakan upaya-upaya dalam penanggulangan bencana agar dapat mengurangi dampak dari risiko bencana. Risiko dari bencana dapat dikurangi dengan adanya penyadaran atau kewaspadaan dari awal sebelum bencana terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah kepada masyarakat tentang kebencanaan.

Selaras dengan kejadian serta dampak yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi di Indonesia maka sejatinya masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas bencana dari pemerintah Indonesia, sebagaimana yang termazkur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai legitimasi hukum tentang kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sebagaimana yang juga termazkur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam perspektif kebijakan publik dapat dikatakan bahwa dalam proses perencanaan, perumusan, dan implementasi program serta evaluasi dalam penanganan bencana di Indonesia masih banyak terhalang oleh berbagai masalah, mulai dari belum tersosialisasinya peraturan perundangan, belum terbentuknya lembaga di daerah, sumber anggaran yang terbatas, dan lebih dari semua itu adalah masalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana. Selain itu, dibutuhkan juga peran serta dari pemerintah daerah untuk menjadi entitas paling depan dalam program penanggulangan bencana.

Secara implisit sepenuhnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman memberikan instruksi penuh kepada pihak BPBD Kabupaten Pasaman untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan tersebut merupakan wujud serta komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam membangun masyarakat khususnya di bidang penanggulangan bencana yang akan berdampak pada tingkat ketentraman dan keselamatan masyarakat Kabupaten Pasaman. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas, BPBD Kabupaten Pasaman berpedoman kepada Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman

Nomor 59 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas dan fungsi serta uraian tugas BPBD Kabupaten Pasaman.

Implementasi program merupakan sebuah kegiatan yang dijalankan oleh pelaksana kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam isi kebijakan. Setiap kebijakan harus dikawal proses implementasinya, karena banyak kebijakan yang baik dalam segi konteksnya namun gagal dalam memberikan dampak. Menjawab pertanyaan tersebut, beberapa ahli mengidentifikasi variable-variabel yang diduga mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan publik. Salah satunya yaitu Van Meter dan Van Horn yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Implementasi program pengurangan risiko bencana (PRB) meliputi disiplin seperti manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, tetapi PRB juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan mereka juga harus mengurangi risiko bencana. Di sisi lain, kebijakan pembangunan yang tidak sehat akan meningkatkan risiko bencana dan kerugian bencana. Dengan demikian, PRB melibatkan setiap bagian dari masyarakat, pemerintah, sektor profesional dan swasta untuk secara bersama-sama bertindak.

Dalam melihat proses Implementasi program pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh BPBD dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman, peneliti menggunakan rentang waktu 2018-2022, acuan yang peneliti jadikan sebagai dasar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 59 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas dan fungsi serta uraian tugas BPBD Kabupaten Pasaman, Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pasaman 2021-2026, serta Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026. Hal ini karena acuan tersebut setidaknya dapat memberikan suatu acuan kerangka dasar dalam perencanaan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan manajemen sumber daya aparatur BPBD Kabupaten Pasaman dalam rangka pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan hasil pemetaan peneliti mengenai riset tentang implementasi program pengurangan risiko bencana, topik penelitian mengenai implementasi program pengurangan risiko bencana ini masih terfokus pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana secara umum. Sedangkan topik penelitian mengenai implementasi program pengurangan risiko bencana masih minim untuk ditemukan. Terkait implementasi kebijakan penanggulangan bencana terdapat beberapa penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh [Widyanti et al., \(2014\)](#), dengan judul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir (Studi Kasus Proyek Normalisasi Banjir Kanal Barat dan Kali Garang Kota Semarang) ditemukan bahwa proses normalisasi Banjir kanal Barat dan Kali Garang dirasakan mampu menjadi jawaban atas isu banjir yang ada di masyarakat. Namun normalisasi ini bukan satu-satunya cara untuk mengendalikan banjir, harus ada dukungan optimalisasi fungsi drainase kota Semarang.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh [Silmi et al., \(2019\)](#), yang berjudul implementasi kebijakan penanggulangan bencana daerah di Kota Sukabumi ditemukan bahwa proses implementasi kebijakan penanggulangan bencana daerah belum

optimal dimana hal ini dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi masih kurang dan merata, sumber daya manusia dan sarana prasarana masih belum ada penambahan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh [Rahayu et al., \(2021\)](#), yang berjudul implementasi kebijakan penanggulangan banjir Pemerintah Kota Manado di Kecamatan Singki ditemukan bahwa kebijakan penanggulangan banjir Pemerintah Kota Manado di Kecamatan Singkil belum diimplementasikan secara menyeluruh. Hal ini ditemukan melalui hasil observasi dan wawancara, yakni masih ada sebagian daerah rawan banjir di Kecamatan Singkil yang belum disentuh untuk pembangunan tanggul dan normalisasi sungai sebagai bentuk pengendalian banjir di Kecamatan Singkil.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan implementasi kebijakan penanggulangan bencana yang pada akhirnya dapat menciptakan suatu kebaharuan di dalam penelitian terkait penanggulangan bencana. Meskipun pada dasarnya sama-sama penelitian yang bertemakan implementasi kebijakan penanggulangan bencana, namun terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini, perbedaan tersebut terletak pada sudut pandang penelitian ini, dimana penelitian ini akan lebih berfokus pada pelaksanaan program pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasaman.

Pada penelitian ini, dalam melihat proses Implementasi program pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh BPBD dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Kabupaten Pasaman, peneliti menggunakan pendekatan teori Implementasi menurut [Van Meter & Van Horn, \(1975\)](#), terdapat enam variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja, yaitu 1) Standar dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya, 3) Karakteristik agen pelaksana, 4) sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana, 5) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan 6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Model implementasi ini merupakan suatu upaya untuk menyederhanakan realitas implemetasi kebijakan yang rumit menjadi lebih sederhana, yaitu sebagai hubungan sebab akibat antara keberhasilan implementasi dengan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut.

Peneliti berasumsi bahwa diperlukan suatu proses implementasi pengurangan risiko bencana yang dilakukan secara maksimal, terukur, efektif dan efisien oleh pihak BPBD Kabupaten Pasaman. Hal ini mengingat Kabupaten Pasaman merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi bencana tinggi di Sumatera Barat dengan berbagai jenis kejadian bencana pula. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi program pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasaman dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Pasaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif ([Nayar & Stanley, 2014](#)). Sedangkan teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan informasi yang diketahui. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan teknik *purposive sampling* didalam pemilihan informan penelitian akan memudahkan peneliti dalam mendapatkan informan yang tepat yang dianggap

mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Guarte & Barrios, 2017).

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah lembaga, yaitu BPBD Kabupaten Pasaman. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Miles & Saldana (2014), sementara itu untuk menguji keabsahan data yang didapat di lapangan dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dengan melakukan langkah-langkah seperti reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Adapun proses implementasi program pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman dilakukan dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang peneliti temukan di lapangan dan mengaitkannya dengan teori model implementasi dari Van Meter dan Van Horn, yaitu mencakup enam dimensi implementasi, yakni Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik para agen pelaksana, disposisi/kecenderungan, komunikasi antar organisasi, dan kondisi sosial ekonomi dan politik (Van Meter & Van Horn, 1975).

Adapun pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasaman, Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pasaman. Pihak pemerintah Nagari yang rawan akan terjadinya bencana banjir bandang di Kabupaten Pasaman, yaitu Nagari Ladang Panjang, Nagari Silayang dan Nagari Panti, serta Kelompok Siaga Bencana yang terdapat pada daerah rawan bencana di Kabupaten Pasaman, yaitu Kelompok KSB Ladang Panjang pada Kecamatan Tigo Nagari, KSB Nagari Silayang dan Nagari Muaro Sungai Lolo pada Kecamatan Mapat Tunggul Selatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam proses pencapaian tujuan dari suatu organisasi tentu dibutuhkan kebijakan yang mengatur proses pencapaian tujuan dari organisasi tersebut (Aulia et al., 2024). Dalam hal ini pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman memiliki beberapa kebijakan yang terdiri pada setiap tahapan dalam penanggulangan bencana. Pada tahapan pra bencana BPBD Kabupaten Pasaman memiliki program “peningkatan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan peningkatan kapasitas BPBD dalam penanggulangan bencana”. Pada tahapan pada saat terjadinya bencana BPBD Kabupaten Pasaman memiliki program “penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pasca bencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir atau terpadu”. Selanjutnya pada tahapan pasca bencana BPBD Kabupaten Pasaman memiliki program JITUPASNA (Pengakjian Jitu Pasca Bencana) dan pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh”.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan hasil wawancara tentang variabel standar dan sasaran kebijakan organisasi dapat disimpulkan bahwa pihak BPBD Kabupaten Pasaman sudah memiliki kebijakan dalam penanggulangan bencana yang nantinya akan direalisasikan kedalam beberapa bentuk kegiatan dan program. Kebijakan ini dirumuskan sekali lima tahun, kebijakan yang dirumuskan ini juga harus sesuai dan dapat mencapai strategi BPBD Kabupaten Pasaman, serta kebijakan yang diterapkan ini juga harus bisa mendukung tercapainya strategi dan tujuan serta visi dan misi dari BPBD Kabupaten Pasaman.

Sedangkan dalam upaya pengurangan risiko bencana sendiri Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman belum mempunyai program khusus, akan tetapi secara keseluruhan dalam menanggulangi bencana banjir bandang yang dapat dikategorikan besar yang pernah terjadi di Kabupaten Pasaman dalam kurun lima tahun terakhir seperti kejadian bencana di Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan pada tahun 2020 dan Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari pada tahun 2022, pada tahapan pra bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman mempunyai program, yaitu: “pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam”, dengan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain terlaksananya kegiatan pencegahan dini penanganan bencana alam di Kabupaten Pasaman, kegiatan pencegahan dini penanganan bencana alam di Kabupaten Pasaman, pelaksanaan kegiatan pemberian sosialisasi tentang penanggulangan bencana pada masyarakat pada daerah rawan bencana di Kabupaten Pasaman terbentuknya Nagari Tangguh Bencana di Kabupaten Pasaman, tersedianya rambu rambu peringatan bencana pada daerah rawan bencana di Kabupaten Pasaman, terbentuknya Kelompok Siaga Bencana pada setiap Nagari di Kabupaten Pasaman, penyusunan rencana kontingensi (*contingency plan*) (Renstra BPBD Kabupaten Pasaman Tahun 2017-2022).

Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana, pihak BPBD Kabupaten Pasaman sudah melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat terkait peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang bencana, serta peningkatan kapasitas Nagari dalam menghadapi bencana. Berdasarkan temuan peneliti sosialisasi ini sudah dilakukan pada 36 Nagari dari 62 Nagari yang tersebar pada setiap Kecamatan di Kabupaten Pasaman, adapun hasil yang dapat dilihat dari proses sosialisasi ini adalah meningkatnya jumlah Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pasaman dimana pada tahun 2023 sudah terbentuk 36 Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pasaman. Berikut ini adalah hasil dokumentasi pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPBD Kabupaten Pasaman:



Gambar 2. Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pasaman

Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Pasaman 2023

Berdasarkan gambar 2. dapat dilihat rangkaian kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pihak BPBD Kabupaten Pasaman kepada masyarakat. Selanjutnya dari aspek sistem peringatan dini kepada masyarakat, pihak BPBD Kabupaten Pasaman sudah melakukan penempelan rambu peringatan bencana pada daerah yang rawan terjadinya bencana di Kabupaten Pasaman, hal ini juga didukung dengan

penggunaan aplikasi *inarisk* BNPB yang merupakan jenis aplikasi ios atau android yang dapat diakses oleh pihak Nagari atau masyarakat untuk mengetahui potensi bencana apa saja yang ada di daerahnya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan bahwa pihak BPBD Kabupaten Pasaman saat ini belum memiliki rencana kontingensi (*contingency plan*) dalam upaya pengurangan risiko bencana terutama bencana banjir bandang. Pada saat ini pihak BPBD Kabupaten Pasaman baru memiliki Kajian Risiko Bencana (KRB) serta Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Pasaman walaupun RPB tersebut baru terangkum 80%. Hal ini perlu ditingkatkan lagi mengingat Kabupaten Pasaman merupakan daerah yang rawan akan bencana alam diakibatkan faktor letak geografi dan topografinya, pencapaian hal ini juga turut mendukung realisasi Peraturan BNPB No. 2 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana.

Secara keseluruhan pada variabel standar dan kebijakan berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan dari proses wawancara dan observasi di lapangan bahwa proses penyelenggaraannya program dan kegiatan yang dijalankan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman dalam pengurangan risiko bencana belum terealisasi secara optimal, hal ini dapat dilihat dari kegiatan program yang belum terealisasi seluruhnya. Dimana penulis menemukan bahwa belum seluruh Nagari di Kabupaten Pasaman memiliki Desa Tangguh Bencana (Destana), Kelompok Siaga Bencana (KSB), dimana hal tersebut baru terdapat 36 Nagari dari 62 Nagari secara keseluruhan serta belum satupun dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) pada Nagari yang terdapat di Kabupaten Pasaman, ditambah lagi masih ada Kecamatan yang belum satupun Nagari di dalamnya yang memiliki Destana dan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di daerahnya, yaitu Kecamatan Panti padahal Kecamatan tersebut merupakan Kecamatan yang rawan akan terjadinya bencana banjir bandang.

Penulis juga menemukan bahwa belum terdapatnya rencana kontingensi (*contingency plan*) dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman hal ini juga salah satu faktor penyebab Indikator Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Pasaman akan bencana tergolong rendah serta kesiapsiagaan masyarakat Kabupaten Pasaman terutama terhadap bencana banjir bandang rendah.

Sumber Daya

Dalam suatu proses implementasi program tentunya membutuhkan sumber daya, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya non manusia misalnya finansial dan waktu. Keberhasilan proses implementasi program tersebut sangat tergantung dari sejauh mana ketersediaan sumber daya mampu mengalokasikan standar dan sasaran kebijakan. Jika sumber daya tidak memadai, maka pada akhirnya berakibat pada tidak berjalannya dengan baik implementasi kebijakan tersebut (Kusmaningtyas, 2009). Untuk itu pelaksanaan implementasi harus diikuti dengan tersedianya sumber daya yang memadai dalam pelaksanaannya. Van Meter dan Van Horn membagi sumber daya menjadi dua jenis, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Dukungan sumber daya manusia dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kuantitas dan aspek kualitas (Utamy et al., 2020). Dalam penelitian ini, sumber daya manusia yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak BPBD Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan hasil wawancara tentang variabel sumber daya terutama indikator sumber daya manusia, dalam menjalankan kegiatan demi tercapainya kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman perlu adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam menanggulangi bencana. Untuk sumber daya manusia sendiri Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman mempunyai memiliki 49 sumber daya manusia, termasuk Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman.

Sedangkan dalam proses pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman pihak BPBD dibantu oleh tim reaksi cepat (TRC) BPBD Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana yang berjumlah 27 orang. Penulis menemukan bahwa dari segi kualitas pihak BPBD Kabupaten Pasaman masih perlu untuk meningkatkan lagi kapasitas tim TRC tersebut, dimana penulis menemukan bahwa baru terdapat 3 orang yang memiliki sertifikat keahlian dari jumlah anggota TRC seluruhnya, yaitu 27 orang.

Sertifikat ini sangat dibutuhkan oleh para anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Pasaman karena memberi manfaat misalnya kemampuan anggota TRC dalam melaksanakan pertolongan di air (*water rescue*), dan pertolongan di daerah ketinggian. Sertifikat tersebut dapat diperoleh dari pelatihan pelatihan yang sudah ditentukan, biasanya dari mereka para anggota TRC harus melakukan pelatihan dengan waktu maksimal 72 jam barulah mereka dapat diberikan sertifikat keahlian.

Secara keseluruhan dari indikator sumber daya manusia, pihak BPBD Kabupaten Pasaman memiliki jumlah sumber daya manusia yang dinilai kurang dari segi jumlah dan kompetensi, hal ini tentu menjadi sebuah prioritas yang harus diatasi untuk kedepannya oleh pihak BPBD Kabupaten Pasaman dan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman agar program dan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman dapat terealisasi secara optimal

b. Sumber Daya Non Manusia

Selain sumber daya manusia, keberadaan sumber sumber daya lain juga harus diperhitungkan seperti sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Terdapat hubungan yang saling berkaitan antara sumber daya manusia dengan non manusia dalam proses implementasi kebijakan. Hal ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan bantuan dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang akan dituju dari program tersebut (Inzay et al., 2022).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan hasil wawancara tentang variabel sumber daya terutama indikator sumber daya anggaran dimana sumber anggaran yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pasaman tersebut adalah bantuan anggaran dari Pemerintahan Pusat dan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman yang berasal dari pendapatan asli daerah

Kabupaten Pasaman. Bantuan anggaran dari pemerintahan pusat apabila terjadi bencana yang dikategorikan cukup besar di Kabupaten Pasaman seperti kejadian bencana banjir bandang yang pernah terjadi di Kabupaten Pasaman tepatnya di Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan pada tahun 2020 dan Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari pada tahun 2022.

Secara keseluruhan dari indikator sumber daya anggaran, pihak BPBD Kabupaten Pasaman memiliki jumlah anggaran yang belum cukup untuk proses pelaksanaan semua kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan, hal ini karena bencana yang dihadapi oleh Kabupaten Pasaman beragam dan sebagian besar memiliki potensi yang besar pula. Untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan prabencana banjir bandang di Kabupaten Pasaman, BPBD Kabupaten Pasaman membutuhkan sistem dan peralatan yang canggih, di mana hal tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar serta perawatan yang juga harus dilakukan untuk menjaga keadaan agar tetap melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang. Seharusnya dalam proses pelaksanaannya, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman harus memberikan pelatihan dan pembekalan pengetahuan tentang penanggulangan bencana terhadap masyarakat tidak dapat diselenggarakan secara optimal.

Karakteristik Agen Pelaksana

Sifat atau karakteristik para agen pelaksana (*Stakeholders*) dalam hal ini adalah para agen pelaksana atau dinas terkait yakni pihak BPBD Kabupaten Pasaman yang melaksanakan sosialisasi peningkatan kapasitas pemerintah Nagari dalam menghadapi bencana yang terdapat di Kabupaten Pasaman, dimana peningkatan kapasitas ini dilakukan dengan pembentukan Destana dan KSB oleh tiap Nagari serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penanggulangan bencana dan potensi bencana yang berpotensi terjadi pada daerah tempat tinggal masyarakat tersebut dan sering melakukan komunikasi dengan Kecamatan yang rawan akan terjadinya bencana banjir bandang di Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan serta hasil observasi dan variabel karakteristik agen pelaksana, pihak BPBD Kabupaten Pasaman sudah membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) serta Kelompok Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Pasaman yang sudah sebanyak 36 Nagari. Sebagai upaya penguatan kapasitas masyarakat dan Nagari dalam menghadapi bencana pihak BPBD Kabupaten Pasaman juga sudah memberikan sosialisasi pada tingkat Kabupaten dengan para aparatur pemerintahan di Nagari. Dalam sosialisasi ini dihadiri oleh para wali nagari, para jorong seluruh Nagari di Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana melalui upaya pembentukan Kelompok Siaga Bencana pada setiap Nagari di Kabupaten Pasaman, setidaknya kegiatan sosialisasi ini yang sudah dimulai sejak tahun 2022 sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali di Kabupaten Pasaman.

Sedangkan yang terlibat dalam proses sosialisasi ini adalah pihak BPBD Kabupaten Pasaman beserta jajarannya, anggota TRC (Tim Reaksi Cepat). Kemudian di luar dari BPBD Kabupaten yang terlibat dalam program sosialisasi ini adalah pemerintahan nagari, FPRB Nagari dan KSB Nagari dan tidak terkecuali para aktivis atau pemerhati lingkungan.

Selain itu pihak BPBD Kabupaten Pasaman juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Pasaman, dimana pihak BPBD Kabupaten Pasaman melakukan kunjungan ke setiap Nagari di Kabupaten Pasaman dan memberikan sosialisasi terkait potensi bencana pada Nagari tersebut dan bagaimana langkah menghadapinya. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini BPBD Kabupaten Pasaman dibantu oleh anggota TRC (Tim Reaksi Cepat) BPBD Kabupaten Pasaman serta pihak Nagari setempat dan Pihak Kelompok Siaga Bencana (KSB) jika Nagari tersebut sudah memilikinya. Kelompok Siaga Bencana (KSB) sangat diharapkan dapat membantu pemerintah terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selain itu juga diharapkan dapat membantu masyarakat dengan cepat karena Kelompok Siaga Bencana dapat dengan cepat dan mudah menjangkau wilayahnya yang terkena bencana banjir bandang.

Secara keseluruhan dari variabel karakteristik agen pelaksana dapat disimpulkan bahwa dalam urusan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman, pihak BPBD Kabupaten Pasaman sudah memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait penguatan kapasitas Nagari dalam menghadapi bencana dimana dalam kegiatan tersebut pihak BPBD Kabupaten Pasaman mewajibkan seluruh Nagari untuk membentuk Destana dan KSB walaupun presentase jumlah Nagari yang sudah merealisasikannya baru sekitar 50% dimana baru 36 Nagari dari 62 Nagari di Kabupaten Pasaman. Selain itu mengenai pelatihan yang diberikan oleh pihak BPBD Kabupaten Pasaman terhadap Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang terdapat pada Nagari ini, belum semua Nagari yang sudah memiliki KSB mendapatkan pelatihan. Berikut ini adalah dokumentasi gambar pelatihan dan pembekalan yang dilaksanakan oleh pihak BPBD Kabupaten Pasaman kepada Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.



Gambar 3. Pelatihan KSB oleh BPBD Kabupaten Pasaman
Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Pasaman 2023

Berdasarkan gambar 3. dapat dilihat rangkaian kegiatan pelatihan Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang dilakukan oleh pihak BPBD Kabupaten Pasaman. Akan tetapi peneliti menemukan bahwa Kelompok Siaga Bencana (KSB) belum terdapat pada setiap Nagari di Kabupaten Pasaman, misalnya pada Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, padahal daerah ini merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi di Kabupaten Pasaman terutama peristiwa banjir bandang dan gempa bumi karena daerah ini juga terletak di daerah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Pasaman disertai akses medan jalan yang juga cukup sulit karena berada di hamparan pematang

Bukit Barisan. Hal ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan lagi untuk kedepannya oleh pihak BPBD Kabupaten Pasaman terutama pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman karena daerah Kabupaten Pasaman merupakan daerah yang memiliki kerawanan yang tinggi akan bencana, sudah seharusnya permasalahan penanggulangan bencana ini menjadi program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Pasaman.

Disposisi Para Agen Pelaksana Kebijakan

Disposisi atau kecenderungan para agen pelaksana maksudnya adalah setiap komponen dalam kelima model Implementasi Kebijakan akan disaring melalui persepsi dari para implementor mengenai nilai tanggungjawab dan komitmen dalam melaksanakan kebijakan setelah adanya sikap menunjukkan karakteristik sebagai agen pelaksana (Sutmasa, 2021),

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan hasil observasi dan wawancara tentang variabel disposisi atau kecenderungan para agen pelaksana ditemukan bahwa disposisi atau kecenderungan para agen pelaksana ini cukup baik dilakukan karena dari beberapa kebijakan yang sudah dilaksanakan, telah adanya upaya dari para agen pelaksana atau *skateholder* terkait untuk merealisasikan program penanggulangan bencana banjir bandang di Kabupaten Pasaman. Hal ini dapat dilihat mulai dari proses memetakan ancaman bencana yang berpotensi menimpa masyarakat di Kabupaten Pasaman dimana di Kabupaten Pasaman terdapat 9 jenis ancaman yang berpotensi, merumuskan dan mengkaji bagaimana manajemen penanggulangan bencananya, dimana penanggulangan bencana terdapat 3 tahapan kegiatan di dalamnya yaitu tahapan pra bencana (mitigasi bencana), pada saat terjadinya bencana, serta pasca bencana.

Pada tahapan pra bencana pihak BPBD Kabupaten Pasaman mempersiapkan bagaimana masyarakat Kabupaten Pasaman untuk siap dan siaga dalam menghadapi bencana dimana sebelum adanya pertolongan datang mereka sudah mampu menyelamatkan diri mereka. Hal ini juga merupakan proses realisasi akan salah satu program pemerintah daerah Kabupaten Pasaman, yaitu "Pasaman Tanggap Bencana" yang direalisasikan dalam bentuk pembentukan Destana, KSB, serta pemberian sosialisasi penguatan kapasitas dalam bencana kepada pihak Nagari dan masyarakat. Meskipun secara keseluruhan ditemukan bahwa program dan kegiatan penanggulangan korban bencana alam masih belum begitu dapat meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat Kabupaten Pasaman, hal ini dapat dilihat dengan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir bandang. Untuk itu, harus ada strategi yang baik dan mumpuni dari BPBD Kabupaten Pasaman sendiri agar dalam pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Secara keseluruhan dari variabel disposisi para agen pelaksana kebijakan dapat disimpulkan bahwa pihak BPBD Kabupaten Pasaman harus meningkatkan kompetensi para pegawainya sebagai bagian dari agen pelaksana kebijakan di bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman. Hal ini karena penulis menilai banyak para pegawai yang kurang serius dalam melaksanakan tugasnya serta kurang memahami bidang yang dikelolanya dalam konteks penanggulangan bencana yang diakibatkan karena seringnya proses pergantian jabatan di Kabupaten Pasaman yang disebabkan oleh faktor

politik, hal ini tentu mempengaruhi kualitas program kegiatan penanggulangan bencana yang diberikan oleh pihak BPBD Kabupaten Pasaman belum terealisasi secara sempurna.

Berdasarkan data yang peneliti temukan bahwa Indikator Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Pasaman akan bencana tergolong rendah serta kesiapsiagaan masyarakat Kabupaten Pasaman terhadap bencana banjir bandang rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya di dalam BPBD Kabupaten Pasaman seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana dan prasarana di dalam pihak BPBD Kabupaten Pasaman.

Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Komunikasi antar organisasi perlu untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber-sumber informasi dalam rangka memperjelas standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan. Baik atau tidaknya saluran komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut. Demikian pula, untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan adanya pendorong atau penguatan terhadap pihak pelaksana. Aktivitas penguatan yang dimaksud adalah *technical advice and assistance* dan ganjaran baik positif maupun negatif, bagi pihak pelaksana kebijakan (Purnomo, 2018).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan hasil wawancara tentang variabel Komunikasi agen pelaksana dapat disimpulkan bahwa pihak BPBD Kabupaten Pasaman dengan pihak Kecamatan dan Nagari yang rawan akan terjadinya bencana banjir bandang di Kabupaten Pasaman berjalan sangat baik namun bersifat kondisional, begitupun komunikasi dengan masyarakat mengenai kebijakan penanggulangan banjir, komunikasi sering dilakukan secara struktural dari pihak BPBD Kabupaten Pasaman kepada pihak-pihak Kecamatan dan Nagari yang rawan akan terjadinya bencana banjir bandang di Kabupaten Pasaman, walaupun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak BPBD Kabupaten Pasaman seperti tidak semua wilayah Kecamatan dan Nagari yang rawan akan terjadinya bencana banjir bandang di Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pasaman ditemukan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana bandang di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan tepatnya di Nagari Muaro Sungai Lolo yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2020 yang lalu, memberikan pembelajaran untuk kedepannya bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman serta dinas terkait untuk melakukan dan melaksanakan pekerjaan secara optimal jika suatu saat nanti kembali terjadi bencana alam yang serupa di Nagari Muaro Sungai Lolo ini. Hal ini karena proses penanggulangan bencana pada daerah Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan tergolong sedikit rumit jika dibandingkan dengan penanggulangan bencana pada daerah lain di Kabupaten Pasaman.

Menurut pendapat peneliti hal ini juga wajar terjadi karena beberapa faktor seperti Nagari Muaro Sungai Lolo merupakan daerah yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten dengan medan perjalanannya yang jauh dan dapat dikategorikan cukup berat karena belum semua jalan akses ke Nagari ini diaspal serta masih susah akses komunikasi pada Nagari ini. Seharusnya hal seperti ini harus diperhatikan secara lebih serius oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman untuk kedepannya.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan salah satu faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Hal yang sama pula, bahwa kondisi sosial perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, karena hal ini merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan publik (Akib, 2010).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan hasil wawancara tentang variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dari segi sosial dapat ditemukan bahwa kesadaran masyarakat dan tanggapan masyarakat mengenai kebijakan penanggulangan banjir bandang tersebut masih rendah, diketahui bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Pasaman yang tidak peduli menjaga kebersihan seperti menghindari adanya penumpukan sampah di saluran drainase maupun di sungai. Selain itu juga ditemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana banjir bandang di Kabupaten Pasaman yang melakukan aktifitas penebangan hutan secara liar hal ini dapat dijumpai di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Rao Utara, dan Mapat Tunggul serta proses penambangan emas secara liar yang banyak dilakukan pada Kecamatan Duo Koto.

Selanjutnya faktor ekonomi juga sangat berpengaruh dalam proses kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman, hal ini dapat dilihat dari mayoritas masyarakat Kabupaten Pasaman yang memiliki profesi sebagai petani yang dimana mereka sering melakukan proses penebangan hutan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian masyarakat seperti lahan pertanian jagung dan perkebunan kelapa sawit, hal ini dapat dijumpai pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Pasaman.

Selain itu kondisi politik di Kabupaten Pasaman juga memberikan dampak yang besar dalam proses penanggulangan bencana ini dimana seringkali proses mutasi para pegawai (dipindahkan karena faktor politik) mengakibatkan rendahnya pemahaman para pegawai akan bidang yang dikelolanya dalam konteks penanggulangan bencana. Selain itu keterlibatan dari para anggota DPRD Kabupaten Pasaman terkait penanggulangan bencana sudah dapat dilihat dimana sudah terdapat beberapa anggota DPRD Kabupaten Pasaman yang merealisasikan dana pokirnya dalam hal penanggulangan bencana.

Secara keseluruhan dari variabel kondisi sosial, ekonomi dan politik yang dimiliki oleh Kabupaten Pasaman, sudah seharusnya pihak Pemerintah Daerah beserta instansi terkait, yakni BPBD Kabupaten Pasaman agar lebih serius dalam menyikapi kondisi sosial, ekonomi dan politik tersebut. Sudah seharusnya pihak BPBD Kabupaten Pasaman memiliki strategi dan kebijakan mumpuni yang nantinya akan dilaksanakan dalam beberapa bentuk program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman. Diperlukan proses monitoring terhadap aktivitas penebangan liar dan penambangan liar di Kabupaten Pasaman, selanjutnya juga dibutuhkan proses sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat Kabupaten Pasaman tentang bagaimana dampak pembukaan ladang berpindah, serta untuk pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sendiri harusnya lebih meningkatkan kapasitas daerahnya dalam konteks penanggulangan bencana seperti kepemilikan sumber daya manusia yang mumpuni dan kompeten dalam penanggulangan bencana.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi program pengurangan risiko bencana oleh BPBD Kabupaten Pasaman belum direalisasikan secara menyeluruh, hal ini dapat dilihat dengan belum terpenuhinya semua indikator teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yang telah dibahas secara keseluruhan implementasi program pengurangan risiko bencana oleh BPBD Kabupaten Pasaman belum diimplementasikan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapatnya permasalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan dari implementasi program pengurangan risiko bencana seperti kurangnya sumber daya aparatur yang dimiliki oleh pihak BPBD Kabupaten Pasaman dalam merealisasikan atau melaksanakan program pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasaman. Selain itu kurangnya anggaran yang dimiliki dalam proses implementasi program pengurangan risiko bencana juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini dimana hal ini menyebabkan program dan kegiatan tidak berjalan semestinya. Seharusnya dalam proses pelaksanaannya, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman harus memberikan pelatihan dan pembekalan pengetahuan tentang penanggulangan bencana terhadap masyarakat yang diselenggarakan secara optimal.

REFERENSI

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1–11.
- Alif, S. M., Sauri, M. S., & Perdana, R. S. (2021). Perubahan Kecepatan Subduksi Lempeng Indo-Australia terhadap Lempeng Sundaland akibat Gempa Bumi Samudera Hindia tahun 2016. *Jurnal Geosains Dan Teknologi*, 4(3), 159–167. <https://doi.org/10.14710/jgt.4.3.2021.159-167>
- Arif, M. (2019). ANALISIS WILAYAH BERPOTENSI BANJIR DAERAH SUMATERA BARAT UNTUK PELAKSANAAN PEMBELAJARAN GEOGRAFI BERORIENTASI BENCANA ALAM. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 4(1). <https://doi.org/10.34125/kp.v4i1.393>
- Aulia, Rahmi et al. (2024). Implementasi Manajemen Kepemimpinan Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi. *Journal of Student Research*, 2(1), 121–131. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i1.1908>
- Azizah, M., Khoirudin Apriadi, R., Tri Januarti, R., Winugroho, T., Yulianto, S., Kurniawan, W., & Dewa Ketut Kerta Widana, I. (2021). Kajian Risiko Bencana Berdasarkan Jumlah Kejadian dan Dampak Bencana di Indonesia Periode Tahun 2010 – 2020. *PENDIPA Journal of Science Education*, 6(1), 35–40. <https://doi.org/10.33369/pendipa.6.1.35-40>
- BNBP. (2023). *Bnpb Indonesia Alami Bencana Alam Pada 2023*. Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnpb-indonesia-alami-3522-bencana-alam-pada-2023>
- Desfandi, M. (2014). Urgensi Kurikulum Pendidikan Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia. *Socio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 1(2), 191–198. <https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1261>
- Guarte, & Barrios. (2017). *Estimation Under Purposive Sampling, Communication in Statistics Stimulation and Computation*.
- Inzay, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, Purwanto, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3573–3588.
- Kusmaningtyas, A. (2009). Pentingnya Pemilihan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi. DiE: *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 6(1). <https://doi.org/10.30996/die.v6i1.94>
- Lubis, A. M. (2020). Telaah Ulang Pergerakan Lempeng Tektonik Indo-Australia Dengan Menggunakan Data Gps Tahun 1994-2016. *Journal Online of Physics*, 5(2), 12–16. <https://doi.org/10.22437/jop.v5i2.9751>
- Maharani, N. (2023). ABSTRAK Indonesia salah satu negara yang rawan akan bencana alam seperti gempa bumi dan gunung api. Bencana-bencana alam tersebut bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah satu provinsi di Indonesia yang rawan akan letusan gunung api adalah Bali. *Pen. PENDIPA Journal of Science Education*, 7(2), 320–326. <https://doi.org/10.33369/pendipa.7.2.320-326>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd. Sage Publications, Inc.
- Nayar, S., & Stanley, M. (2014). Qualitative research methodologies for occupational science and therapy. In *Qualitative Research Methodologies for Occupational Science and Therapy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203383216>
- Prasetya, M., & Camara Paris, A. (2022). RETRACTED: Dampak Pembangunan di Era Globalisasi terhadap Perwujudan Hak Asasi Manusia di Lingkungan yang Baik dan Sehat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(12), 1000–1010. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.317>
- Purnomo, A. (2018). Pelaksanaan Kebijakan Komunikasi Organisasi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 11. <https://doi.org/10.33506/jn.v3i2.111>
- Rahayu et al. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BANJIR PEMERINTAH KOTA MANADO (Studi Kasus di Kecamatan Singkil) INDAH PUTRI RAHAYU. *Jurnal Unsrat*, 7, 20–29.
- Silmi, N. R., Nur, T., & Purwanti, D. (2019). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sukabumi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 1(1), 30–40. <https://doi.org/10.31539/joppa.v1i1.800>
- Suhardjo, D. (2015). Arti Penting Pendidikan Mitigasi Bencana Dalam Mengurangi Resiko Bencana. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2. <https://doi.org/10.21831/cp.v0i2.4226>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Tahmidaten, L., & Krismanto, W. (2019). Implementasi Pendidikan Kebencanaan di Indonesia (Sebuah Studi Pustaka tentang Problematika dan Solusinya). *Lectura : Jurnal Pendidikan*, 10(2), 136–154. <https://doi.org/10.31849/lectura.v10i2.3093>
- Tamitiadini, D., Adila, I., & Dewi, W. W. A. (2019). Komunikasi Bencana : Teori dan Pendekatan Praktis. In *Komunikasi: Vol. XIII No 01*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=%5C&id=bE3SDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR5%5C&dq=bencana+a+alam%5C&ots=PYylDsxRmj%5C&sig=hLfs5BMWfNSYd9L57sdK2J-zUs>
- Utamy, R., Ahmad, S., & Eddy, S. (2020). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia. *Journal of Education Research*, 1(3), 225–236. <https://doi.org/10.37985/jer.v1i3.26>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Widyanti, P., Kismartini, K., & Maesaroh, M. (2014). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir (Studi Kasus Proyek Normalisasi Banjir Kanal Barat dan Kali Garang Kota Semarang). *Journal Of Public Policy And Management Review*, Volume 3(No 3), 1–9.